

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA LUBUK KERANJI TIMUR
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Oleh:

**Titin Arianti
NPM : 167310169**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKAN BARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

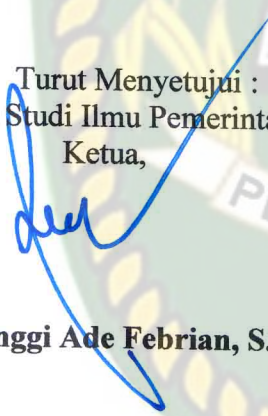
Nama : Titin Arianti
NPM : 167310169
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam
Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur
Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 25 Juni 202019

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.


Drs. H. Zaini Ali, M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Titin Arianti
NPM : 167310169
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam
Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur
Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimannya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 09 juli 2020

Ketua,

Sekretaris,


Drs. H. Zaini Ali, M.Si.


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.

Mengetahui
Wakil Dekan I

Anggota.


Indra Safri, S.Sos., M.Si.


Andriyus, S.Sos., M.Si.



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Titin Arianti
NPM : 167310169
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya Ilmiah.

Ketua

Pekanbaru, 16 Juli 2020
Sekretaris


Drs. H. Zaini Ali, M.Si.


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,




Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 204/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 08 Juli 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 09 Juli jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Titin Arianti
NPM : 167310169
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Kerandi Timur Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan.**

Nilai Ujian : Angka : ” 81 ” ; Huruf : ” A- ”
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Ketua	1.
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sekretaris	2.
3.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	3.
4.	Rijalul Fikri, MA	Notulen	4.

Pekanbaru, 09 Juli 2020

An. Dekan



Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 204/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 258/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Titin Arianti
N P M	: 167310169
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan ugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Kerandi Timur Kecamatan Bandar Petalang Kabupaten Pelalawan.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. H. Zaini Ali.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Dita Fisdian Adni.,SIP.,M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Andriyus.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rijalul Fikri.,MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Pekanbaru
Pada Tanggal : 06 Juli 2020
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK/080402337

- Tembusan Disampaikan Kepada :**
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 3. Yth. Ketua Prodi IP.....
 4. Arsip...SK Penguji ...

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Drs. H. Zaini Ali., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 16 Juli 2020



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRAC.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan	13
2. Konsep Manajemen	18
3. Konsep Pembangunan.....	20
4. Konsep Demokrasi.....	25
5. Konsep Pemerintah Desa	27
6. Konsep Desa dan Otonomi Desa	28
7. Konsep Kebijakan.....	31
8. Evaluasi Kebijakan	34

9. Partisipasi Masyarakat	39
10. Konsep Masyarakat.....	42
11. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	47
B. Penelitian Terdahulu	50
C. Kerangka Pikiran	51
D. Konsep Operasional	51
E. Operasional Variabel.....	53
F. Teknik Pengukuran.....	54
BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel.....	58
D. Teknik Penarikan Sampel	58
E. Jenis dan Sumber Data.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	61
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	61
I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	61
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kecamatan Lubuk Keranji Timur.....	63
B. Tugas Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	64
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	67
1. Identitas Responden.....	69
B. Evaluasi Tugas Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Di Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir	69
1. Efektivitas.....	71

2. Efisiensi	75
3. Kecukupan	79
4. Perataan	83
5. Responsivitas	87
6. Ketepatan	91
C. Hambatan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	99
BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR KEPUSTAKAAN	107
DAFTAR LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lubuk Keranji Timur Tahun Anggaran 2016-2018	8
I.2 Pembangunan Fisik Desa Lubuk Keranji Timur berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran tahun 2018.....	10
II.1 Penelitian Terdahulu	50
II.2 Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	53
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Daerah Penelitian.....	58
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	62
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur	68
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	69
V.4 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ..	72
V.5 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. .	76
V.6 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ..	80
V.7 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ..	84

V.8	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ..	88
V.9	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ..	92
V.10	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	108
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	112
3. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	115

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DESA DI DESA LUBUK KERANJI TIMUR
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN
KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

Oleh : Titin Arianti

Pemerintah Desa melalui Kepala Desa diberikan kewenangan didalam penyelenggaraan pembangunan Desa berdasarkan atas kepentingan masyarakat Desa. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pembangunan Fisik Desa meliputi Peningkatan Jalan Desa, pembangunan Box Curver dan pembangunan Semenisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan serta faktor Penghambat dalam Pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif, dimana Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan kuesioner yang dibagikan terhadap responden penelitian. Selain pembagian kuesioner Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Teknik Analisa data dengan pengolahan data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa cukup baik, dimana kepala desa telah melaksanakan tugasnya dalam pembagunan fisik Desa meskipun belum secara serentak dapat dilaksanakan pada tahun berlangsung. Kendala yang dihadapi dalam pembangunan fisik Desa bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan Kepala Desa terhadap keberlangsungan kegiatan pembangunan Desa, belum adanya kerjasama dengan masyarakat desa secara merata terkait penetapan pembangunan fisik Desa yang akan dilaksanakan dan Kepala Desa belum memahami secara luas upaya pengembangan pembangunan kegiatan pembangunan fisik Desa. Namun penulis menyarankan Kepala Desa agar menerima masukan dan bekerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik Desa serta meningkatkan kemampuan Kepala Desa terhadap upaya pengembangan pembangunan fisik Desa.

Kata Kunci : Evaluasi, Tugas, Pembangunan.

EVALUATION OF THE DUTIES OF VILLAGE HEADS IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF VILLAGES IN LUBUK KERANJI TIMUR VILLAGE, BANDAR PETALANGAN DISTRICT, PELALAWAN REGENCY

ABSTRACT

BY : Titin Arianti

The Village Government through the Village Head is authorized to carry out Village development based on the interests of the Village community. Implementation of Duties of the Head of Lubuk Keranji Timur Village, Bandar Petalangan Subdistrict, Pelalawan Regency in the Physical Development of the Village completed the Improvement of Village Roads, the construction of a Box Curver and the construction of a Semenisasi. This study aims to determine the implementation of the task of the Village Head in the Village Physical Development in the Village of East Lubuk Keranji, District of Bandar Petalangan, Pelalawan Regency and Inhibiting Factors in Implementation. The research method used is quantitative, where data collection techniques use a questionnaire that was distributed to research respondents. In addition to distributing questionnaires Data collection techniques used were observation and documentation. Data analysis techniques with data processing were obtained from research respondents, then processed to then be presented in tabular form then analyzed. From the results of research conducted in Lubuk Keranji Timur Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency, it can be seen that the Implementation of the Village Chief's Duties in the Physical Development of the Village is quite good, where the village head has done his job in the physical development of the village event even though it cannot be done simultaneously in the current year. The obstacle faced in the physical development of the Village is the lack of supervision carried out by the Village Head on the continuity of the Village development activities, there is no cooperation with the village community evenly related to the determination of the physical development of the Village to be made. and Village Heads do not understand broadly the efforts to develop village physical development activities. However, the authors suggest that village heads receive input and cooperate with the community in village physical development activities and improve the village head's ability to develop the village's physical development.

Keywords: Evaluation, Task, Development.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Tujuan utama dibentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka diselenggarakan pemerintahan Negara Indonesia. Untuk mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 371 menyebutkan dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan Desa penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan Desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan

bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa Pasal 25 Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

1. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDesa.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
3. Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat
 - b. tokoh agama
 - c. tokoh masyarakat
 - d. tokoh pendidikan
 - e. perwakilan kelompok tani
 - f. perwakilan kelompok nelayan
 - g. perwakilan kelompok perajin
 - h. perwakilan kelompok perempuan
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
4. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Maka dari itu semua unsur masyarakat bisa ikut serta dalam memusyawarahkan sebuah pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. Itu pentingnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa serta pembangunan oleh pemerintah dengan membuat kebijaksanaan yang mendorongnya untuk berkembangnya keikutsertaan masyarakat Desa.

Konsekuensi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan Desa, yaitu pasal 18 Bab IV dimana disebutkan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.

Pemerintahan Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa dimaksudkan yaitu ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemerintahan Desa yang memang telah ada sejak Desa tersebut dibentuk, seperti pelaksanaan peraturan-peraturan Desa yang menyangkut tradisi adat istiadat Desa setempat.

2. Urusan pemerintahan yang berdasarkan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa.

Desa diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan tetap terkoordinasi melalui pelimpahan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota.

3. Tugas pemantauan dari pemerintah, pemerintah Propinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.

Yaitu tugas-tugas yang bersifat pemantauan baik perkembangan penduduk, dan lain sebagainya, dengan demikian Desa adalah penyelenggara pemerintahan terendah didalam susunan pemerintahan.

4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, pemerintah Desa diberi kewenangan sangat besar salah satunya yaitu pemerintah Desa bertugas melaksanakan pembangunan.

Artinya, pemerintah bersama perangkat Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa tersebut. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 mengatakan “kepala Desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dimaksud dalam konteks pengembangan masyarakat dapat dicermati sebagai suatu proses perencanaan pembangunan partisipatif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, berdasarkan potensi sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan prioritas dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Menurut Marbun (2002:113) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat. Pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya.

Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kecamatan yang sedang berkembang dengan luas wilayah 371,94 Km², terdiri dari 6 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 22.888 Jiwa, sedangkan dari Desa tersebut adalah Desa Lubuk Keranji Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 1.559 jiwa dengan laki-laki sebanyak 800 jiwa dan perempuan sebanyak 759 jiwa.

Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa dimana pada Pasal 44 kepala desa dalam melaksanakan sejumlah tugas-tugas sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 2 tugas Kepala Desa atau Kepala Desa diatas salah satu diantaranya adalah penyelenggaraan pembangunan secarapartisipatif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan terhadap Desa Lubuk Keranji Timur adalah melakukan musrembang.

Sesuai dari hasil dari berita acara musyawarah Desa yaitu pembahasan BPD terhadap RPJMDes 2016 – 2021 dimana dalam rapat tersebut telah disepakati mengenai pokok – pokok hasil musyawarah seagai berikut:

A. Menyepakati RPJMDes dengan rincian sebagai berikut :

B. Bidang pembangunan

- a. Peningkatan Jalan Desa
- b. Pembangunan Jalan Desa
- c. Pembangunan Jalan Kelompok
- d. Pembangunan Bahu Jalan
- e. Drainase Jalan Jalur – Jalur Kepala Desaan Yang Dirasa Perlu
- f. Seminisasi
- g. Pembangunan Pagar TK
- h. Pengadaan Alat Permainan TK
- i. Pemasangan Pafing Blok Halaman Kantor Kepala Desa Lubuk Keranji Timur
- j. Pembangunan Drainase Jalan Poros Kepala Desaan
- k. Pembangunan Rukan Babinkantibmas
- l. Pembangunan Box Couver
- m. Servis Dan Perbaikan Gorong – Gorong Jalan Lingkungan
- n. Pembangunan Drainase Lapangan Sepak Bola
- o. Pembangunan Rumah Bidang Kepala Desaan
- p. Pembangunan Kantor Kepala Desaan Baru
- q. Pemasangan Pafing Blok Depan TK
- r. Pembangunan Gedung MDA
- s. Pembangunan Kantor Kepala Dusun.

Berdasarkan pola pemikiran diatas yang dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem

pemerintahan nasional dan berada dikabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai rencana pembangunan tahunan desa (RKPDesa) untuk dapat mendukung suatu pembangunan melalui anggaran yang ada di RKPDesa harus sesuai dengan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) untuk dapat menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran,dalam pembangunan yang disusun oleh pemerintahan pusat atau aparatur desa yang membahas tentang besarnya alokasi anggaran yang bersangkutan serta program dan kegiatan yang akan dilakukan. Dengan cara, pengalokasian anggaran pembangunan daerah akan dapat menjadi lebih terarah dan efisien serta dapat menjamin pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan APBDes.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang anggaran dalam bidang pelaksanaan pembangunan di Desa Lubuk Keranji Timur sesuai dengan APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa), ini lah tabel dibawah yang menjelaskan perincian atau pelaporan berupa catatan keuangan dalam pengalokasikan anggaran pembangunan daerah dapat dilihat dibawah ini :

Tabel I.1 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lubuk Keranji Timur Tahun Anggaran 2016-2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)
2016		
1	Pendapatan asli desa hasil usaha desa	20.000.000
2	Pendapatan transfer	1.207.000.000
3	Dana desa	616.590.000
4	Alokasi dana desa	774.578.000
Jumlah Pendapatan		2.618.168.000

2017		
1	Pendapatan asli desa hasil usaha desa	22.500.000
2	Pendapatan transfer	1.421.722.000
3	Dana desa	790.780.000
4	Alokasi dana desa	821.671.000
Jumlah Pendapatan		2.265.893.000
2018		
1	Pendapatan asli desa hasil usaha desa	24.700.000
2	Pendapatan transfer	1.561.721.000
3	Dana desa	597.680.000
4	Alokasi dana desa	689.241.000
Jumlah Pendapatan		2.873.342.000

Sumber : APBDes 2016-2018

Adapun sesuai dengan penjelasan tabel diatas tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lubuk Keranji Timur Tahun Anggaran 2016-2018 serta sumber pendapatan desa untuk memenuhi keperluan-keperluan pemerintah desa dan masyarakat desa dan dana-dana yang dianggarkan untuk pembangunan desa.

Pelaksanaan rancangan pembangunan Desa sangatlah dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dikarenakan masyarakat lebih merasakan dan mengetahui apa saja pembangunan yang selayaknya dilakukan di Desa tersebut. Adapun berikut data perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Pembangunan Fisik Desa Lubuk Keranji Timur berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran tahun 2018

No	Pembangunan Jalan	Volume	Jenis	Sumber Dana	Ket
1	Peningkatan Jalan Desa RT 02	150 m x 2.10 = 315	Penimbunan Bahu Jalan	APBDes	Belum Selesai
2	Pembangunan Box Curver RT 04	40x40x100 cm	Box Curver.	APBDes	Belum Selesai
3	Semenisasi Jalan RT 02	100 M x 4 M x 0.15 M = 400	Semenisasi	APBDes	Belum Selesai

Sumber: Kantor Kepala Desa Lubuk Keranji Timur, 2020

Dari tabel diatas Pembangunan jalan Desa Lubuk Keranji Timur berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaran tahun 2018. Pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Lubuk Keranji Timur. Hal ini Kepala Desa lebih memberikan pemerataan pembangunan di tengah masyarakat sehingga diketahui masih banyak pembangunan yang belum selesai dan tepat sasaran.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa peran kepala Desa belum dapat melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa terlihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum menjadi suatu kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan musyawarah secara luas yang diberikan Kepala Desa dengan masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pembangunan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan diatas adapun fenomena didalam pelaksanaan tugas kepala Desa dalam membangun jalan Desa Sebagai Berikut:

1. Diketahui bahwa Kepala Desa belum maksimal didalam pelaksanaan pembangunan Desa melalui penetapan program kegiatan pembangunan Fisik Desa terlihat pada table I.2 masih adanya perencanaan pembangunan belum selesai dikerjakan sehingga menghambat pertumbuhan

pengembangan pembangunan Desa dan menghambat aktivitas warga masyarakat Desa.

2. Kepala Desa belum menerapkan akan hasil dari aspirasi masyarakat sehingga banyak usulan masyarakat dalam pembangunan fisik belum diterima dan terealisasi dalam pembangunan fisik Desa.
3. Diketahui sumberdaya kemampuan kepala Desa belum mampu didalam penetapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan Desa dalam pembangunan fisik yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Desa.

Dari Fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan Analisa dengan judul penelitian yaitu **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **“Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
- b. Akademis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
- c. Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliti lainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Musanef (dalam Syafie 2003 :32) mendefenisikan Ilmu Pemerintahan sebagai berikut:

1. Suatu Ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan ubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi kordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari timbulnya pertentangan- pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Rosenthal (dalam Ndraha 2005 :321) merumuskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses itu secara internal maupun eksternal. Sedangkan Brasz merumuskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu di susun dan difungsikan, baik secara internal dan maupun eksternal, yaitu terhadap warga negara)

Selanjutnya Syafie (2005 : 36), mendefanisikan ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin

bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang di perintah.

Syafhendri (2008 : 35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Ndraha (2008:174) berpendapat bahwa ada tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dengan tujuan masing-masing. Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Aparatur pemerintahan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah diambil sumpah jabatannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya baik pada dirinya sendiri, oranglain (masyarakat) dan kepada Tuhannya (Allah) dengan sebaik-baiknya guna mensejahterakan masyarakat banyak, sebagai mana sesuai dengan fungsi dari pemerintahan itu sendiri, sebagaimana seperti yang telah dijelaskan diatas.

Selanjutnya Budiarto (2003 : 21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dalam wilayah

suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara dengan konsep-konsep dasar Negara tersebut

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafie, 2005:32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya `hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Munaf (2015:47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Munaf 2015:47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris

(*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).

2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Munaf, 2015:48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

Menurut perspektif Kybernologi, Ndraha (2005:192) Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat. Dibentuknya suatu system pemerintahan, pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Rasyid (1998:102) Fungsi pemerintah dibagi menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Rosecelt dalam

Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahnya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Terkait dengan pelayanan, Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, pribadi atau privat, sedangkan jasa public bersifat kolektif, karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu, dimana pemerintahan mempelajari bagai mana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sinambela (2011:198) Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.

Hal senada juga Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.

Osborne dan Plastrik (2004:322) mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi. Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan public akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, serta lebih efisien.

2. Konsep Manajemen

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan untuk keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial dan memproses sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. (siagian,2008: 5).

Wahyudi (2002:12) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya manusia organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Perencanaan, yaitu melaksanakan tugas dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia.

- b. Fungsi Pengorganisasian, yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.
- c. Fungsi Pelaksanaan, yaitu memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Fungsi Pengendalian, yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, khususnya di bidang tenaga kerja.

Menurut Usman Effendi (2014: 1) manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sebagainya.

Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta (2015: 4) manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka menerapkan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Manullang (2008: 5) adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan

(approach) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh factor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indra manusia (Siswanto, 2011: 7).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa manajemen adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan sebagainya.

3. Konsep Pembangunan

Menurut Tarigan (2005: 18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro, mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa :

- a. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
- b. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
 - 1) *Life sustenance* : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - 2) *Self-Esteem* : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.

- 3) *Freedom From Survitude* : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer, yaitu:

- a. *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
- b. *Equity*, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
- c. *Empowerment*, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
- d. *Suistanable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Arief (2006: 29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih.

Menurut Suryono 2001: 31), tujuan pembangunan ada dua tahap. *Pertama*, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap *kedua* adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan

tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono,) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, *Pertama*, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. *Kedua*, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara.

Siagian (2009: 21) mendefinisikan pembangunan adalah: “Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.” Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.

Menurut Rauf dan Maulidiah (2015: 249) Pembangunan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan

ekonomi, perubahan social dan modernisasi bangsa guna penigkatan kualitas hidup manusia dan kesejahtraan masyarakat. Tahap Pelaksanaan Pembangunan desa meliputi :

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pengawasan
 - a. Tahap perencanaan unsur pengembangan pembangunan peningkatan kesejahtraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.
 - b. Tahap pelaksanaan pembagunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa dengan masyarakat desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama.
 - c. Tahap pengawasan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa

Menurut Nurman (2015: 131) Pembangunan adalah manajemen pembangunan menuju suatu perubahan yang lebih baik yang diinginkan dalam upayah yang terencana dengan cara tidak merusak dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada dengan baik yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengoordinasian, Pengontrolah :

- a. Perencanaan bentuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta waktu jangka pembangunan yang akan terlaksana.

- b. Pengorganisasian langkah untuk menetapkan mengelola pembangunan desa dengan sumber daya seta lingkungan desa dalam pembangunan desa dengan tepat.
- c. Pengoordinasian proses pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dalam kemajuan pembangunan desa
- d. Pengontrolah mengatur berbagai factor pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan pencapaian tujuan pembangunan.

Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan desa.

Begitu juga menurut Juliantara (2003: 63) Berkenaan dengan pembangunan desa, Juliantara mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: “Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah

untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

4. Konsep Demokrasi

Menurut Ubaidillah (2008:39) demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Sharma, (2004:4) Dalam perkembangannya, Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya)

Menurut Held (2004:56) Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

5. Konsep Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yang memimpin yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya (Lembaga Administrasi Negara, 2009). Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan:

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Rozali (2007:171) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan. Karena tugas pemerintah desa yang begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pengembangan Perangkat Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

6. Konsep Desa dan Otonomi Desa

1. Desa

Menurut Juliantara (2000:18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang dikatakan rendah. Sedangkan dari sudut pandang politik dan hukum, desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak ditemukan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang dikemukakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

“Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai administrasi penyelenggara pemerintahan desa”.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara

mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

2. Otonomi Desa

Menurut Widjaja(2003:165) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban Menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

Menurut Fakrulloh dkk (2004:77) bahwa : dalam memaknai otonomi asli terdapat dua aliran pemikiran yaitu :

- a. Aliran pemikiran pertama memakai kata otonomi asli sebagai otonomi adat atau Dekat dengan social budaya, dan .
- b. Aliran pemikiran yang memaknainya sebagai otonomi yang diberikan. Oleh karenanya digagasan pemikiran bahwa otonomi desa sebagai otonomi masyarakat sehingga lebih tepat disebut otonomi masyarakat desa.

Menurut Jualliantara (2003:116) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan Dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi Institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Menurut Sutoro (2005:74) Otonomi desa hingga saat ini masih menjadi isu perdebatan baik ditinjau dari pengertiannya maupun hakekatnya. Jika dilihat dari

berbagai kebijakan pengaturan tentang desa yang ada hingga saat ini maka otonomi desa tidak secara eksplisit memiliki pengertian yang jelas dan dapat diterima secara umum.

Wasistiono (2007:31) menyebutkan bahwa desa selain mempunyai wewenang untuk menga-tur dan mengurus kepentingan rumah tang-ganya sendiri juga memposisikan desa di bawah kabupaten. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke kabupaten dan desa. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada Desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan mudah dikontrol oleh rakyat setempat.

7. Konsep Kebijakan

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011:42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik

dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelencaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008:190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003:3) menyatakan bahwa *“Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials”*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005:150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan

lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007:17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003:6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif(masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004:3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

8. Evaluasi Kebijakan

Menurut Jones evaluasi (1999: 78) adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar sosial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai bukti yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran
3. Sosial hasil

a. Jenis-jenis Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

b. Proses Evaluasi

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada manajemen, sedangkan pendaayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

c. Fungsi Evaluasi

Wahad (2002:51) Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Menurut Dunn (2003:187) berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Selanjutnya kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.

2. Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

d. Konsep Evaluasi

Draha mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu, menurut mereka dalam melakukan evaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses yang mendasarkan dari pada disiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan. Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan penyelenggara pelayanan pemerintah.

Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

1. Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai
2. Tersedianya dana, dan prasarana yang diperlukan.
3. Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
4. Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan berbagai kegiatan operasional.
5. Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan dengan tujuan dan visi, misi sasaran jangka panjang.

Draha juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta daan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,treatment) tolak ukur adalah before
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakuan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Adapun langkah-langkah evaluasi yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2003: 185) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan standar (kendali,s) beberapa standar, *das solen*, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya atau data tes dengan data control.
2. Pemantauan fakto (f)
3. Perbandingan F dan S
4. Hasil perbandingan $F=S, F<S, FS$.
5. Analisis perbandingan berdasarkan model-model diatas.
6. Tindak lanjut
 - a. Tindak Korektif
 - b. Tindak afirmatif
 - c. Feedback.

Berdasarkan penjelasan diatas dimana evaluasi adalah merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya guna sejauhmana ketetapan peraturan yang ditetapkan dan sejauhmana fakta yang telah terjadi.

9. Konsep Partisipasi

Menurut Windardi dalam Wiguna (2010:76) partisipasi adalah ikut serta seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Partisipasi akan maksimal bila masyarakat ikut dalam pelaksanaan kegiatan, karena didalam partisipasi terdiri atas:

1. Partisipasi dapat wajib melaksanakan dan dapat pula suka rela.

Partisipasi yang sifatnya diwajibkan kepada masyarakat berarti partisipasi yang memang harus dilakukan oleh masyarakat dan biasanya terdapat aturan-aturan yang mengikat dalam pelaksanaan partisipasi tersebut. Contohnya partisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang dan diwajibkan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi.

Partisipasi suka rela yaitu partisipasi yang tidak memiliki unsur paksaan dan tidak terdapat peraturan yang mengikat dan dapat diikuti oleh masyarakat tanpa harus memenuhi syarat apapun. Contohnya partisipasi dalam melaksanakan kegiatan gotong-royong yang di jadwalkan oleh aparat desa setempat.

2. Partisipasi dapat formal dan informal

Partisipasi formal hampir sama dengan partisipasi wajib dimana setiap pelaksanaannya di atur dan ditentukan dengan seksama, serta biasanya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Sebaliknya, partisipasi non formal tidak memiliki aturan dan syarat-syarat yang baku yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, partisipasi non formal lebih bersifat fleksibel dan lebih cenderung bersifat suka rela.

3. Partisipasi bisa bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung.

Partisipasi langsung adalah partisipasi masyarakat yang dilaksanakan secara langsung dalam arti kata masyarakat terlibat dalam kegiatan yang dilakukan seperti pembangunan jalan desa, masyarakat turun langsung ke lokasi

untuk melakukan pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Sedangkan partisipasi tidak langsung adalah partisipasi masyarakat dimana masyarakat tidak turut serta secara langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan, contohnya masyarakat hanya berpartisipasi dalam memberikan atau menyediakan akomodasi dan konsumnsi bagi pekerja pembangunan jalan desa.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata partisipasi dapat diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Kata partisipasi mengandung pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih baik.

Partisipasi menurut Miriam Budiardjo (2003:185) adalah Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga seseorang atau sekelompok orang yang aktif tersebut merupakan faktor terpenting dari semua kegiatan politik dalam menentukan pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, menurut Taliziduhu Ndraha, 2000: 18, partisipasi publik dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan

Yaitu proses ini adalah proses dimana masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menentukan kegiatan pembangunan dan hal-hal lain yang akan menjadi acuan pada tahap partisipasi selanjutnya.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Proses ini adalah pelaksanaan keputusan-keputusan dan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Sehingga masyarakat langsung berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Dimana masyarakat berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Setelah pembangunan selesai dan dimanfaatkan oleh masyarakat selanjutnya masyarakat melakukan evaluasi untuk mencari kelemahan dan kekurangan yang ada pada pembangunan tersebut.

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan merasa memiliki terhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan.

10. Konsep Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. (Gaventa dan

Vlderma dalam Siti Irene: 2011:54) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah melahirkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat kepada orang lain duduk dalam pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi tetap melekat setiap individu yang bersangkutan.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas.
3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna dimana dengan berpartisipasi secara langsung dalam mengambil keputusan akan ada banyak gagasan-gagasan serta ide-ide yang dapat tertuang agar pembangunan desa dapat terlaksana lebih baik lagi.
4. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental. Dengan kata lain partisipasi masyarakat telah tersusun baik jadwal rapat, pelaksanaan pembangunan dan hal-hal lain sehingga pelaksanaan

partisipasi masyarakat lebih teratur. Hal ini tentu mengacu pada lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemerintah desa yang menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat

5. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Desentralisasi pemerintahan memungkinkan pemerintah desa dapat menggali potensi yang ada di desanya dan mengembangkannya sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus mengandalkan dan bergantung pada pemerintahan pusat.
6. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokrasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatkannya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

Menurut Siti Irene: (2011:54). Faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat antara lain:

1. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat. Hal ini berkaitan dengan pola pikir dan rasa egois masyarakat yang tidak peduli dengan pembangunan yang

belangsung di tempat tinggalnya tersebut. Meningkatkan kesadaran masyarakat adalah tugas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat mau ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

2. Aspek-aspek tipologi (Pembuktian dan jurang)

Aspek tipologi ini berkaitan dengan keadaan alam dimana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan terhambat karena keadaan alam yang tidak memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan

3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)

Aspek geografis ini juga menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimana memerlukan waktu dan tenaga untuk dapat sampai pada lokasi atau tempat dimana pembangunan itu dilaksanakan.

4. Demografis (Jumlah penduduk)

Jumlah penduduk juga berpengaruh besar terhadap partisipasi dalam pembangunan. Dimana jumlah penduduk yang banyak lebih cenderung partisipasi dalam pembangunan kurang dikarenakan pola pikir mereka yang menganggap masih banyak orang lain yang bisa ikut kegiatan pembangunan tersebut.

5. Ekonomi (Desa miskin/tertinggal)

Faktor ekonomi ini menjadi faktor yang sudah menjadi alasan umum bagi masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Dimana

mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada berpartisipasi dalam kegiatan pembangua yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:51) memberikan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program, saat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen & Hoff, meliputi: *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana.

Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
4. Partisipasi dalam partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

11. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (*internal*), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (*eksternal*) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Huraerah Abu (2008:85), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang

mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan.

Menurut Huraerah, (2008:97) Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor internal

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Huraerah, 2008:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. *Pengetahuan dan keahlian.*

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

2. *Pekerjaan masyarakat.*

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktu untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada

masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

3. *Tingkat pendidikan dan buta huruf.*

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginandan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami danmelaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

4. *Jenis kelamin.*

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masihmenganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuanmasyarakat untuk berpartisipasi, beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akanmempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

5. *Kepercayaan terhadap budaya tertentu.*

Masyarakat dengan tingkat heterogenitasyang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategipartisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkalikepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

b. *Faktor-faktor Eksternal*

faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan danmempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yangmempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting gunakesuksesan program.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori
1	Ridwan	Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam pembangunan fisik Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir.	Evaluasi Kebijakan : 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan
2	Elyasip S Sembiring	Evaluasi kinerja Kepala Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Desa Rambai Kecamatan Siak Kabupaten Siak	Kinerja : 1. Potensi 2. Keahlian 3. Tanggap 4. Responsivitas
3	Faisal Yunan	Skripsi Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam pembangunan Desa Rawang Kao Kecamatan Rawang Kao Kabupaten Siak	Evaluasi Kebijakan : 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas
3	Rinaldi	Skripsi Evaluasi Tugas Lurah Dalam pembangunan fisik Desa Lubuk Keranji Timur Panjang Kiri Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	Evaluasi Kebijakan : 1. Standar 2. Fakta
5	Hardiansyah	Skripsi Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam pembangunan fisik Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir	Evaluasi Kebijakan : 3. Standar 4. Fakta

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2019

Adapun perbedaan penelitian terdahulu terkait penelitian ini adalah bentuk pembangunan yang lebih spesifik terkait pembangunan fisik di desa dengan menggunakan metode penelitian Kuantitatif dan dijelaskan dengan metode kualitatif serta perbedaan indikator teori yang digunakan, serta perbedaan yang lebih terperinci bahwa sipeneliti melihat ketetapan Pembangunan yang akan dilaksanakan dan melihat sejauh mana pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik.

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan



Sumber : Medifikasi Penelitian, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk Menghilangkan serta menghindari dari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa adalah pelaksanaan pembangunan berdasarkan tuntutan Desa dalam pengembangan Desa oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
2. Pembangunan Jalan Desa adalah Pembangunan jalan infrastrukturnya dengan tujuan berlangsungnya kegiatan aktivitas masyarakat Desa.
3. Partisipasi Masyarakat adalah sejauh mana masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam lajunya pembangunan di Desa.
4. Efektivitas adalah keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
5. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.
6. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
7. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

9. Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II. 2: Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai/Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>assement</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)	Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan	Efektivitas	1. Perencanaan Pembangunan. 2. Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Efisiensi	1. Anggaran Pembangunan. 2. Pencapaian Pembangunan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Kecukupan	1. Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Desa. 2. Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Perataan	1. Kegiatan pembangunan 2. Pemerataan Pembangunan.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Responsivitas	1. Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. 2. Penetapan pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Desa.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

1	2	3	4	5
		Ketepatan	1. Kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan pembangunan Desa. 2. Kemampuan Kepala Desa dalam keberhasilan pembangunan Desa.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengukur Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variable penelitian yaitu :

Baik :Apabila dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan 66%-100%

Cukup Baik :Apabila dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan 33%-65%

Kurang Baik :Apabila dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan 0%-32%

Kategori pengukuran untuk setiap indikator variable penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Efektivitas, dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Efisiensi dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Kecukupan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Pemerataan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

5. Responivitas dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

6. Ketepatan dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentangpersentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indicator pada katagori baik berada pada rentang persentase 0%-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey deskriptif. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diatas untuk disebarakan kepada sampel yang sudah ditentukan. Sehingga penelitian menggunakan metode Kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penulis lakukan di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, dengan alasan berdasarkan pengamatan yang ditemukan dilapangan, bahwa evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pembangunan fisik Desa belum terlaksana dengan baik dimana masih ditemuinya pelaksanaan pembangunan desa belum terlaksana sesuai dengan waktu penyelesaiannya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiono, 2011: 08).

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kadus, Ketua RW, Ketua RT, BPD dan Masyarakat Desa.

Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Daerah Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Kepala Urusan	3	3	100%
4	Kadus	2	2	100%
5	Ketua RW	2	2	100%
6	Ketua RT	7	7	100%
7	BPD	5	5	100%
7	Mayarakat Penduduk Desa berdasarkan kepemilikan KTP	1.562	20	1.2%
Jumlah		1.583	41	-

Sumber : Data Olaha Penelitian, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dengan keseluruhan subjek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kadus, Ketua RW, Ketua RT dan BPD digunakan penarikan sensus

karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 21 sampel.

Sedangkan terhadap masyarakat Desa dengan menggunakan teknik Purposif Sampling yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dikarenakan jumlahnya yang banyak, hal ini jumlah sampel sebanyak 20 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder yang dapat dibedakan :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari data narasumber yang merupakan sumber informasi untuk memperoleh jawaban mengenai tugas kepala desa didalam pembangunan jalan desa, dokumentasi dan wawancara berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur Organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang berwenang memberikan data seperti data kepegawaian, struktur organisasi, dan lain-lain baik berupa buku, dokumen, leaflet dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data,

adapun tehknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan :

1. Kusioner

Kusioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana tugas Kepala desa didalam pembangunan jalan Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Kusioner di berikan kepada responden dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa dan masyarakat Desa .

2. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian.

3. Wawancara,

Dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur (tersusun) yaitu antara suatu pernyataan dengan pertanyaan lainnya saling berhubungan. Wawancara dilakukan dengan sumber yang relevan yaitu Kepala Desa.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di Interpretasikan. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan berupa pengolahan data yang dilakukan dengan beberapa tahap yakni :

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar pelaksanaan tugas kepala Desa didalam pembangunan jalan Desa dapat diketahui.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas kepala Desa Dalam pembangunan Fisik Desa di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisisioner																
5	Rekomendasi Survey																
6	Survey Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Lubuk Keranji Timur

Kecamatan Lubuk Keranji Timur merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya merupakan sebuah Desa yang dikenal dengan Desa Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar. Pada tahun 2001 Desa Pangkalan Lesung diresmikan oleh Bupati Pelalawan Menjadi Kecamatan Lubuk Keranji Timur.

Kecamatan Lubuk Keranji Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Ukui, Kecamatan Lubuk Keranji Timur, Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Teluk Meranti.

Kecamatan Lubuk Keranji Timur mempunyai luas Wilayah 473 Km² jika dipersentasekan + 95% merupakan Wilayah dataran rendah dengan terdiri dari sembilan Desa dan satu Kelurahan dengan jumlah penduduk + 23.373 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.174 jiwa dan perempuan sebanyak 11.199 jiwa.

1. Batas Wilayah

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bandar Petalangan
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Ukui
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Pangkalan Kuras
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kerumutan

2. Jumlah Desa : 9 (Sembilan)
3. Jumlah Kelurahan : 1 (Satu)
4. Kepadatan penduduk : + 26,4 Jiwa/ Km²
5. Iklim

Kecamatan Lubuk Keranji Timur terletak di Jalur Khatulistiwa dengan iklim panas dengan suhu rata-rata 28 s/d 35^oC dengan ketinggian dari permukaan laut 10- 15 mil serta curah hujan 5.583,5 mm / Tahun.

B. Tugas Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 26

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa:
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa:
 - d. menetapkan Peraturan Desa:
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa:
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa:
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa:
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa:
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa:
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa:
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna:
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif:
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa:
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa:
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan:
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan: dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika:
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa:
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa:
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan:
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender:
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme:
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa:
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik:
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa:
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa:
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa:
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa:
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa:
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa:
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup: dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota:
- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota:
- memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran: dan

- memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Hal ini dapat dilihat dari

jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	31	77%
2	Perempuan	9	23%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 31 orang, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	13	33%
3	40-49 tahun	20	51%
4	≥ 50 tahun	7	15%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang atau sekitar 51%, Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 13 orang atau sekitar 33% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas berjumlah 7 orang atau sekitar 15% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	19	47%
4	Diploma	14	36%
5	Sarjana	6	15%
6	Pasca Sarjana	1	3%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 19 responden atau sekitar 47%, dimana diketahui tingkat Pendidikan yang belum memiliki kemampuan secara luas, kemudian tingkat Pendidikan Diploma sebanyak 14 orang atau sekitar 36% hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan sarjana yang mana berjumlah 6 responden atau sekitar 15%, selanjutnya responden pasca sarjana sebanyak 1 responden atau sekitar 3% dari keseluruhan jumlah responden.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, pemerintah Desa diberi kewenangan sangat besar salah satunya yaitu pemerintah Desa bertugas melaksanakan pembangunan. Artinya, pemerintah bersama perangkat Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa tersebut. Undang-

undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 mengatakan “kepala Desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dimaksud dalam konteks pengembangan masyarakat dapat dicermati sebagai suatu proses perencanaan pembangunan partisipatif yang mengakomodasi aspirasi masyarakat, berdasarkan potensi sumberdaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan prioritas dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan rancangan pembangunan Desa sangatlah dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dikarenakan masyarakat lebih merasakan dan mengetahui apa saja pembangunan yang selayaknya dilakukan di Desa tersebut. Adapun berikut data perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Desa dimana pada Pasal 44 kepala desa dalam melaksanakan sejumlah tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Peran kepala Desa belum dapat melaksanakan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa terlihat bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum menjadi suatu kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan musyawarah secara luas yang diberikan Kepala Desa dengan masyarakat

sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pembangunan yang akan dilaksanakan.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Dengan pengertian efektivitas seperti itu maka dalam Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan.
2. Pelaksanaan Pembangunan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.4. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Perencanaan Pembangunan.	6 (15%)	29 (71%)	5 (15%)	40
2	Pelaksanaan Pembangunan.	8 (20%)	25 (61%)	7 (20%)	40
Jumlah		14	54	12	120
Rata-rata		7	27	6	40
Persentase		18%	67%	15%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efektivitas dalam item penilaian Perencanaan Pembangunan dimana responden penelitian tentang Kegiatan pembangunan bahu jalan yang menjawab terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Perencanaan Pembangunan pemerintah Desa Bersama dengan BPD dan Unsur Masyarakat Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 29 responden atau 71% dengan alasan, Perencanaan Pembangunan belum secara menyeluruh melibatkan Unsur masyarakat melainkan hanya BPD didalam penyaluran aspirasi masyarakat Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15% dengan alasan, Perencanaan Pembangunan belum adanya ketetapan pembahasan secara Bersama pemerintah Desa Bersama BPD dan Lembaga kemasyarakatan Desa melainkan hanya Pemerintah Desa Bersama dengan BPD.

Kemudian untuk item penilaian Pelaksanaan Pembangunan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 8 responden atau 20% dengan alasan, Penetapan Pembangunan oleh Kepala Desa Bersama dengan BPD. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 61% dengan alasan, Penetapan Pembangunan Desa sudah terlaksana akan tetapi belum seutuhnya kegiatan pembangunan Desa berdasarkan aspirasi masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 20% dengan alasan, Diketahui Penetapan Pembangunan belum sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat melainkan penetapan oleh Kepala Desa semata.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Panjang Kiri Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup terlaksana, katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 27 atau 67% dengan alasan, pelaksanaan pembangunan Desa dengan melakukan perencanaan dengan melakukan musyawarah pemerintah Desa dengan BPD dan Unsur Masyarakat serta menetapkan akan hasil perencanaan untuk dilaksanakan akan tetapi kenyataannya didalam perencanaan pembangunan Desa unsur masyarakat belum dilibatkan didalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara menyeluruh melainkan hanya BPD didalam penetapan aspirasi masyarakat sehingga perencanaan pembangunan Desa belum tepat sasaran.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kepala Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 9 Maret 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini pelaksanaan pemabangunan Desa mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan saya sudah melakukan musyawarah didalam rapat perencanaan dengan memberikan himbauan terhadap BPD dan Unsur masyarakat, akan tetapi didalam musyawarah kebanyakan unsur masyarakat tidak ikut hadir secara menyeluruh melainkan hanya perwakilan saja Bersama dengan BPD, yam au tak mau kita harus mengadakan rapat agar pembangunan dapat ditetapkan dan dilangsungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa perencanaan dan penetapan pembangunan Desa bahwa unsur masyarakat belum dilibatkan didalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara menyeluruh melainkan hanya BPD didalam penetapan aspirasi masyarakat sehingga perencanaan pembangunan Desa belum tepat sasaran.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa pembangunan Desa mulai dari perencanaan dan penetapan pemabngunan Desa dengan melakukan musyawarah pemerintah Desa dengan BPD dan Unsur Masyarakat serta menetapkan akan hasil perencanaan untuk dilaksanakan akan tetapi kenyataannya didalam perencanaan pembangunan Desa unsur masyarakat belum dilibatkan didalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara menyeluruh melainkan hanya BPD didalam penetapan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Perencanaan Pembangunan, Penetapan Pembangunan. Sehingga dapat

dikatakan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam katagori Cukup Terlaksana.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan pengertian efisiensi seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efisiensi pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Anggaran Pembangunan.
2. Pencapaian Pembangunan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.5. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Anggaran Pembangunan.	8 (20%)	26 (66%)	6 (15%)	40
2	Pencapaian Pembangunan.	12 (38%)	20 (49%)	8 (20%)	40
Jumlah		20	46	13	123
Rata-rata		10	23	7	40
Persentase		25%	58%	17%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efisiensi dalam item penilaian Anggaran Pembangunan dimana responden penelitian tentang Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menjawab terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Anggaran Pembangunan sudah ditetapkan sesuai dengan pembangaunan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66% dengan alasan, Anggaran Pembangunan sudah ditetapkan berdasarkan penetapan pembangunan yang dilakukan yaitu pemabangunan Pembangunan Bahu Jalan, Pembangunan Box Curve, Semenisasi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Anggaran Pembangunan diketahui tidak sesuai dengan penetapan pelaksanaan pembangunan dikarenakan biaya yang ditetapkan terlalu besar dengan penetapan pelaksana dialapangan.

Kemudian untuk item penilaian Pencapaian Pembangunan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 12 responden atau 38% dengan alasan, Pencapaian Pembangunan sudah ditetapkan dengan tujuan kegiatan pembangunan tepat sasaran sesuai dengan target pelaksana yang akan dilakukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 responden atau 49% dengan alasan, Pencapaian Pembangunan belum memberikan hasil yang maksimal dimana diketahui kegiatan pembangunan belum selesai dengan dengan penetapan target pencapaiannya sekitar 3 sampai 4 bulan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, Pencapaian Pembangunan belum sesuai dengan waktu kegiatan penyelesaian sehingga terlihat tidak sesuai dengan penetapan target penyelesaiannya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Box Curver Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup terlaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 23 atau 58% dengan alasan, pelaksanaan pembangunan dengan mulai dengan penetapan Anggaran pembangunan bahwa ditetapkannya pembangunan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan hasil kegiatan pembangunan belum sesuai waktu

penyelesaian pembangunan sehingga sebagian pembangunan ada yang belum selesai sehingga menunggu kegiatan pembangunan tahun depan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kepala Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 9 Maret 2020 menjelaskan bahwa :

“...sejauh ini kegiatan akan pembangunan mulai dari anggaran dan kegiatan pelaksanaan sampai dengan selesai sudah melalui musyawarah Desa dan sudah berdasarkan pertimbangan bersama dengan tujuan kegiatan pembangunan terlaksana, meskipun pada kegiatan pembangunan belum terlaksana sesuai dengan waktu kegiatan pembangunan yang ditetapkan dikarenakan benturan-benturan dilapangan seperti hari hujan cuaca yang tidak menentu sehingga kegiatan pembangunan terkendala..”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa Anggaran pembangunan bahwa ditetapkannya pembangunan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan hasil kegiatan pembangunan belum sesuai waktu penyelesaian pembangunan.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa pembangunan mulai dari penetapan Anggaran pembangunan Pembangunan Bahu Jalan, Pembangunan Box Curve, Semenisasi bahwa anggaran yang ditetapkan belum sesuai dengan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, dan hasil kegiatan pembangunan belum sesuai waktu penyelesaian pembangunan sehingga sebagian pembangunan ada yang belum selesai sehingga menunggu kegiatan pembangunan tahun depan. Hal ini dapat diketahui melalui item

penilaian Anggaran Pembangunan, Pencapaian Pembangunan. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam katagori Cukup Terlaksana.

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan. Dengan pengertian Kecukupan seperti itu maka dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Desa.
2. Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.6. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Musyawahar rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Desa.	10 (24%)	25 (63%)	5 (12%)	40
2	Musyawahar dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.	12 (41%)	23 (59%)	5 (12%)	40
Jumlah		22	48	10	120
Rata-rata		11	24	5	40
Persentase		27%	60%	13%	100%

Sumber : Olahan Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam item penilaian Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Desa dimana responden penelitian tentang Kegiatan pembangunan bahu jalan yang menjawab terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Desa sudah dilaksanakan lura Usulan semenisasi masyarakat sudah dilakukan Kepala Desa melalui pengundangan pemberian himbauan akan musyawarah pembangunan Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 63% dengan alasan, Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Desa sudah terlaksanakan akan tetapi belum semuan unsur masyarakat mengikuti Musrembang hal ini dikarenakan Kepala Desa belum melakukan pengundangan bagi Unsur masyarakat secara menyeluru. Selanjutnya

untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 12% dengan alasan, diketahui Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Desa belum terlaksana denganmaksimal dimana Kepala Desa belum melakukan pengundangan dari unsur masyarakat didalam Musrembang pembangunan Desa sehingga penetapan musrembang terhadap pembangunan Desa belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

Kemudian untuk item penilaian Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 12 responden atau 41% dengan alasan, Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah dilakukan oleh penguhu dengan melakukan pengundangan terhadap Lembaga Kemasyarakat Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 59% dengan alasan, Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa sudah terlaksana akan tetapi belum semua Lembaga Kemasyarakatan hadir untuk mengikuti musrembang dikarenakan belum dilakukannya pengundangan secara menyeluruh bagi Lembaga Kemasyarakat Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 12% dengan alasan, bahwa Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa belum dihadiri oleh Lembaga kemasyarakatan Desa sevara menyeluruh dikarenakan belum dilakukannya pengundangan oleh Kepala Desa secara menyeluruh.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Box Curver Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup telaksana, kata gori cukup terlaksana dengan nilai responden 23 atau 68% dengan alasan, bahwa pelaksanaan musrembang didalam pembangunan bahwa Kepala Desa belum melakukan pengundangan bagi unsur masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa secara menyeluruh sehingga kegiatan perencanaan pembangunan Desa tidak tetap sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat Desa secara menyeluruh.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kepala Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 9 Maret 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini didalam perencanaan pembangunan Desa saya selaku Kepala Desa sudah melakukan pengundangan terhadap unsur masyarakat Desa dan Lembaga kemasayarakatan Desa didalam perencanaan masyarakat Desa, meskipun sejauh ini belum dapat hasir secara menyeluruh hal ini dikarenakan saya memberikan undangan melalui himbauan saja yang sepantasnya mereka dapat hadir sebagai wakil masyarakat Desa akan tetapi kenyataannya belum secara menyeluruh hadir didalam mengikuti musrembang Desa...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa Anggaran pembangunan bahwa pelaksanaan musrembang didalam pembangunan bahwa Kepala Desa belum melakukan pengundangan bagi unsur masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa pelaksanaan musrembang didalam pembangunan bahwa Kepala Desa belum melakukan pengundangan bagi unsur masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa secara menyeluruh sehingga kegiatan perencanaan pembangunan Desa tidak tepat sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat Desa secara menyeluruh. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Desa, dan Musyawarah dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam katagori Cukup Terlaksana.

4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Dengan pengertian perataan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui perataan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan.
2. Pemerataan Pembangunan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.7. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kegiatan Pembangunan.	7 (17%)	23 (59%)	10 (24%)	40
2	Pemerataan Pembangunan.	8 (20%)	27 (66%)	5 (15%)	40
Jumlah		15	50	15	120
Rata-rata		8	25	7	40
Persentase		20%	63%	17%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam item penilaian Musyawarah rencana Pembangunan dengan unsur masyarakat Desa dimana responden penelitian tentang Kegiatan Pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 7 responden atau 17% dengan alasan, Penetapan Kegiatan Pembangunan meliputi Pembangunan Bahu Jalan, Pembangunan Box Curve, dan Semenisasi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 59% dengan alasan, Penetapan Kegiatan Pembangunan sudah ditetapkan akan tetapi penetapan pembangunan belum sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa sehingga penetapan pembangunan belum tepat sasaran. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, Penetapan Kegiatan Pembangunan belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

Kemudian untuk item penilaian Pemerataan Pembangunan yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 8 responden atau 20% dengan alasan, Pemerataan Pembangunan dengan melakukan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 27 responden atau 66% dengan alasan, Pemerataan Pembangunan belum terlaksana sesuai dengan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat Desa melainkan identik dengan dekat akses Kepala Desa sehingga masih banyak dipedalaman Desa yang belum dilakukannya semenisasi jalan sehingga mempengaruhi akses masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 15% dengan alasan, bahwa Pemerataan Pembangunan Desa belum adanya pemerataan sesuai dengan kebutuhan Desa hal ini terlihat pedalaman Desa belum dilakukannya kegiatan pembangunan sehingga mempengaruhi kegiatan akses masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Penyelenggaraan Pembangunan dalam katagori cukup telaksana, dengan nilai responden 22 atau 64% dengan alasan, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan yang ditetapkan oleh Kepala Desa belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa serata kegiatan pembangunan Desa belum dilaksanakan sampai di pedalam Desa sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga kegiatan pembangunan Desa cenderung yang berdekatan dengan akses Kepala Desa sehingga terlihat belum adanya pemerataan pembangunan agar akses kegiatan masyarakat Desa beralngsung dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kepala Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 9 Maret 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini pemerataan kegiatan pembangunan Desa sudah ditetapkan sampai dengan pelaksanaanny meskipun belum secara merata dilakukannya pembangunan hal ini saya tetapkan tidak secara langsung melainkan secara bergilir dengan tujuan adanya pemerataan bertahap....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa kegiatan pembangunan dengan yang ditetapkan oleh Kepala Desa belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa serata kegiatan pembangunan Desa belum dilaksanakan sampai di pedalam Desa sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan Desa.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan yang ditetapkan oleh Kepala Desa belum tepat sasaran

sesuai dengan kebutuhan pembangunan Desa serata kegiatan pembangunan Desa belum dilaksanakan sampai di pedalam Desa sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga kegiatan pembangunan Desa cenderung yang berdekatan dengan akses Kepala Desa sehingga terlihat belum adanya pemerataan pembangunan agar akses kegiatan masyarakat Desa beralngsung dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Kegiatan Pembangunan, Pemerataan Pembangunan. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam katagori Cukup Terlaksana.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan pengertian perataan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Responsivitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.
2. Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Desa.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.8. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.	9 (24%)	23 (56%)	8 (20%)	40
2	Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Desa.	10 (20%)	24 (66%)	6 (15%)	40
Jumlah		19	47	14	80
Rata-rata		10	23	7	40
Persentase		25%	58%	17%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Responsivitas dalam item penilaian Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dimana responden penelitian tentang Kegiatan Pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau 24% dengan alasan, Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa sudah terlaksana. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 56% dengan alasan, Penetapan Pembangunan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat Desa sudah terlaksana akan tetapi belum secara menyeluruh pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, diketahui bahwa Penetapan Pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa.

Kemudian untuk item penilaian Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Desa yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 10 responden atau 20% dengan alasan, Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Desa sudah dilakukan oleh Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 66% dengan alasan, Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Desa sudah terlaksanakan akan tetapi belum semua yang menjadi aspirasi masyarakat dipehului melainkan pembangunan identic terhadap pengembangan akses Kepala Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Desa belum sesuai dengan aspirasi masyarakat melainkan penetapan oleh Kepala Desa semata sehingga penetapan pembangunan belum tepat sasaran.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Penyelenggaraan Pembangunan dalam katagori cukup telaksana, dengan nilai responden 23 atau 58% dengan alasan, Pelaksanaan pembangunan Desa belum didasarkan oleh aspirasi masyarakat Desa sehingga kegiatan pembangunan tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa melainkan kegiatan pembangunan identic dengan ketetapan Kepala Desa semata serta pembangunan di lingkungan Kepala Desa sehingga penetapan pelaksanaan pembangunan belum terlaksana tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kepala Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 9 Maret 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini pembangunan yang ditetapkan didalam pembangunan Desa sudah berdasarkan aspirasi masyarakat Desa, emang tidak semua tapi kita tetapkan sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa artinya pembangunan kita tetapkan secara bertahan di dekat warga dulu bar uke pedalaman Desa....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa Pelaksanaan pembangunan Desa belum didasarkan oleh aspirasi masyarakat Desa sehingga kegiatan pembangunan tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pelaksanaan pembangunan Desa belum didasarkan oleh aspirasi masyarakat Desa sehingga kegiatan pembangunan tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa melainkan kegiatan pembangunan identic dengan ketetapan Kepala Desa semata serta pembangunan di lingkungan

Kepala Desa sehingga penetapan pelaksanaan pembangunan belum terlaksana tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa, Penetapan Pembangunan berdasarkan Aspirasi masyarakat Desa. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam katagori Cukup Terlaksana.

6. Ketepatan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Dengan pengertian perataan seperti itu maka dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Ketepatan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

1. Kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan pembangunan Desa.
2. Kemampuan Kepala Desa dalam keberhasilan pembangunan Desa.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel V.9. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan pembangunan Desa.	9 (20%)	25 (66%)	6 (15%)	40
2	Kemampuan Kepala Desa dalam keberhasilan pembangunan Desa.	11 (38%)	24 (49%)	5 (20%)	40
Jumlah		20	49	11	80
Rata-rata		10	24	6	40
Persentase		25%	60%	15%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Ketepatan dalam item penilaian Kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan pembangunan Desa dimana responden penelitian tentang Kegiatan Pembangunan yang menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan pembangunan Desa sudah terlaksana.. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 66% dengan alasan, Kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan pembangunan Desa sudah terlaksana akan tetapi Kepala Desa belum mengetahui secara luas apa yang menjadi pembangunan didalam meningkatkan akses kepentingan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 15% dengan alasan, diketahui bahwa Kemampuan

Kepala Desa dalam menerapkan pembangunan Desa belum dapat memberikan kemajuan didalam pembangunan Desa hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan Desa hanya ditetapkan dan dilaksanakan terhadap pemukiman ramai dan dekat dengan lingkungan Kepala Desa melainkan tidak adanya pemerataan pembangunanan sampai kepedalaman Desa.

Kemudian untuk item penilaian Kemampuan Kepala Desa dalam keberhasilan pembangunan Desa yang mana responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 11 responden atau 38% dengan alasan, Kemampuan Kepala Desa dalam keberhasilan pembangunan Desa sudah terlaksana. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan, Kemampuan Kepala Desa dalam keberhasilan pembangunan Desa sudah terlaksana akan tetapi pembagunan yang ditetapkan dan dilaksanakan belum terlaksana dengan maksimal dimana kegiatan pembangunan masih adanya yang belum terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 20% dengan alasan, Kemampuan Kepala Desa dalam keberhasilan pembangunan Desa belum memberikan keberhasilan dimana masih ada pembangunan yang belum terselesaikan didalam pelaksanaanya melainkan harus dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam

Penyelenggaraan Pembangunan dalam katagori cukup telaksana, dengan nilai responden 19 atau 56% dengan alasan, Pelaksanaan pembangunan Desa bahwa Kepala Desa belum memiliki kemampuan didalam menetapkan pembangunan sesuai dengan keadaan Desa dan kepentingan masyarakat Desaa sehingga penetapan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan Kepala Desa belum memberikan kemajuan terhadap pembangunan Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Kepala Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam Penyelenggaraan Pembangunan pada tanggal 9 Maret 2020 menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sudah menetapkan dan melaksanakan pembangunan di Desa dengan kemampuan saya sesuai dengan apa yang menjadi bagian pengembangan pembangunan Desa, emang saya belum secara menyelurh atas kemampuan saya menetapkan kegiatan pemabngunan pembangunan Desa melainkan Bersama dengan apa yang menajdi keinginan masyarakat Desa....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur bahwa Pelaksanaan pembangunan Desa bahwa Kepala Desa belum memiliki kemampuan didalam menetapkan pembangunan sesuai dengan keadaan Desa dan kepentingan masyarakat Desaa.

Berdasarkan hasil Kuesioner, Wawancara dan Observasi penulis lakukan dapat diketahui bahwa pembangunan Desa bahwa Kepala Desa belum memiliki kemampuan didalam menetapkan pembangunan sesuai dengan keadaan Desa dan kepentingan masyarakat Desaa sehingga penetapan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan kemampuan Kepala Desa belum memberikan kemajuan terhadap pembangunan Desa. Hal ini dapat diketahui melalui item

penilaian Kemampuan Kepala Desa dalam menerapkan pembangunan Desa, dan Kemampuan Kepala Desa dalam keberhasilan pembangunan Desa. Sehingga dapat dikatakan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam katagori Cukup Terlaksana.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Efektivitas	7 (18%)	27 (67%)	6 (15%)	40
2	Efisiensi	10 (25%)	23 (58%)	7 (17%)	40
3	Kecukupan	11 (27%)	24 (60%)	5 (13%)	40
4	Perataan	8 (20%)	25 (63%)	7 (17%)	40
5	Responsivitas	10 (25%)	23 (58%)	8 (20%)	40
6	Ketepatan	9 (22%)	24 (59%)	7 (17%)	40
Jumlah		55	146	40	240
Rata-rata		9	24	7	40
Persentase		23%	60%	17%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur

Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam indikator Efektivitas yang menjawab terlaksana 7 atau 18%, Selanjutnya untuk jawaban cukup baik 27 atau 67%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 atau 15%.

Untuk indikator kedua yaitu Efisiensi dalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menjawab terlaksana 10 responden atau 25%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 17%.

Untuk indikator ketiga Kecukupan dalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menjawab terlaksana 11 responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 60%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 13%.

Untuk indikator keempat Perataan dalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menjawab terlaksana 8 responden atau 20%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 63%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 17%.

Untuk indikator kelima Responsivitas dalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menjawab terlaksana 10 responden atau 25%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Untuk indikator keenam Ketepatan dalam Evaluasi Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yang menjawab terlaksana 9 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 7 responden atau 17%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 9 orang atau persentase 23%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 24 orang atau persentase 60%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 7 orang atau 17%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan cukup terlaksana, dimana Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur dengan melakukan musyawarah terhadap masyarakat dan oemerintah Desa terkait pembangauan yang akan dialksanakan serta sesuai dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan yang diberikan terkait

pembangunan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat mulai dari pembangunan bahu jalan Desa, Box Curver serta semenisasi. Pelaksanaan kegiatan pembangunan secara luas belum dilakukan tepat sasaran sesuai dengan ABPDes yang telah ditetapkan sesuai dengan anggaran tahunan dimana diketahui pada pembangunan bahu jalan belum tepat sasaran yaitu pada jalan yang rusak dan dilakukan pelebaran yang berdampak pada kebutuhan warga masyarakat agar bahu jalan dapat digunakan pengendara dan pejalan kaki akan tetapi pembangunan bahu jalan dilakukan pada jalan yang masih jarang dilalui masyarakat sehingga tidak memprioritaskan pada usulan masyarakat, dan pembangunan Pembangunan Box Curver dinilai ditempatkan tidak pada jalan umum Desa melainkan pada jalan yang jarang dilalui masyarakat hal ini terlihat di daerah lingkungan Kepala Desa yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum sehingga dinilai Kepala Desa belum memiliki kemampuan didalam menganalisis akan upaya-upaya penetapan pembangunan yang akan dilakukan, serta pelaksanaan semenisasi diketahui masih dilakukan dilingkungan pemukiman Kepala Desa sementara masyarakat pedalam masih mengalami keterhambatan didalam beraktivitas dikarenakan jalan yang rusak dan telah diusulkan dan dibincangkan akan tetapi Kepala Desa mengutamakan lokasi lain yang berdekatan dengan lingkungannya sehingga diketahui pelaksanaan tugas Kepala Desa didalam pembangunan Desa belum terlaksana dengan baik.

C. Hambatan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan

Diketahui Kepala Desa belum secara maksimal melakukan pengundangan terhadap Unsur Masyarakat Desa dan Lembaga Masyarakat Desa secara menyeluruh didalam Perencanaan Pembangunan Pengundangan sehingga arah penetapan pembangunan belum tepat sasaran sesuai dengan apayang menjadi aspirasi masyarakat.

Diketahui bahwa penetapan Pembangunan Desa oleh Kepala Desa belum mengarah terhadap kebutuhan masyarakat Desa terutama di pedalaman Desa melainkan cenderung didekat kediaman Kepala Desa sehingga terlihat kurang meratanya pembangunan yang terlaksana.

Belum adanya pengawasan yang ketat oleh Kepala Desa terkait kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sehingga pembangunan ada yang belum terselesaikan sesuai dengan waktu penyelesaian yang ditetapkan sehingga kegiatan pembangunan dilanjutkan di tahun berikutnya. Adapun pembangunan yang belum terealisasi sesuai dengan penetapan waktu penyelesaian meliputi

1. Pembangunan Bahu Jalan

Pembangunan bahu jalan belum terlaksana dengan maksimal hal ini diketahui pelaksanaan ketetapan pembagunan bahu jalan tidak sesuai dengan yang dianggarkan dimana diketahui pembangunan bahu jalan di Jalan Sidodadi dengan volum $150 \text{ m} \times 2.10 = 315$ melainkan tercapai hanya 100 m dan Pembangunan Bahu Jalan Jalan Anas $130 \text{ m} \times 2.00 = 260$ melainkan yang terlaksana hanya 100

m Sehingga pada keyatanya tidak sesuai dengan ketetapan pelaksanaan sesuai dengan yang dianggarkan.

2. Pembangunan Box Curver

Pembangunan Box Curver Kep. Lubuk Keranji Timur belum belum terealisasi sesuai dengan waktu penyelesaiannya dimana pembangunan Box Curver harus diselesaikan ke Tahun berikutnya dan Box Curver yang dianggarkan dengan ukuran 40x40x100 yang seharusnya 50x50x100 sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan dilapangan, sehingga terlihat belum tepat sasaran dan pengerjaan Box Curver dinilai masih lamban sementara jalan tersebut akan digunakan masyarakat didalam beraktivitas.

3. Semenisasi

Pelaksanaan semenisasi belum terlaksana sesuai dengan yang dianggarkan meliputi Semenisasi Gang. Ilyas Dusun Tanjung Masjid, Volum $104 \text{ M} \times 2.10 \text{ M} \times 0.15 \text{ M} = 32.76$, pada kenyataannya yang terlaksana hanya 100M, Semenisasi Jalan Datuk Kepala Desa, Volum $173 \text{ M} \times 4 \text{ M} \times 0.15 \text{ M} = 103.8$, pada kenyataannya terlaksana hanya 150m, dan Semenisasi Jalan Saky, volume $100 \text{ M} \times 4 \text{ M} \times 0.15 \text{ M} = 400$, Pada keyataannya terlaksana 90 Meter.

Diketahui bahwa belum mampunya Kepala Desa didalam perencanaan dan penetapan pembangunan mulai sesuai dengan kebutuhan Desa sehingga perencanaan dan penetapan pembangunan Desa belum mengarah terhadap kebutuhandan aspirasi masyarakat Desa.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Panjang Kiri Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup terlaksana dimana diketahui pelaksanaan pembangunan sudah terlaksana namun belum maksimal dimana diketahui penyelenggaraan pembangunan mualai dari perencanaan bahwa Kepala Desa belum melakukan pengundangan terhadap unsur masyarakat Desa dan Lemabga Kemasyarakatan Desa sehingga penetapan pemabangunan tidak tepat sasaran sesuai dengan keinginan masyarakat, dan Kepala Desa belum mampu didalam mengenali akan kebutuhan pembangunan didesa melainkan pembangunan cenderung didekat lokasi kediaman Kepala Desa sehingga terlihat belum adanya pemerataan pemabngunan pembangunan.
2. Hambatan-hambatan di Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Di Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan meliputi :
 - a. Diketahui Kepala Desa belum melakukan kerjasama dengan Unsur Kemasyarakatan KeKepala Desan dan Lemabagan Kemasyarakat Desa didalam pembangunan Desa melalui pengundangan secara menyeluruh didalam Prencanaan Pembangunan Pengundangan

sehingga arah penetapan pembangunan belum tepat sasaran sesuai dengan apayang menjadi aspirasi masyarakat.

- b. Diketahui bahwa Kepala Desa belum melakukan surve terkait akan pembangunan yang akan ditetapkan sehingga penetapan dan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan Desa.
- c. Kepala Desa belum menerima apa aspirasi masyarakat terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga Penetapan Pembangunan Desa oleh Kepala Desa belum mengarah terhadap kebutuhan masyarakat Desa terutama di pedalaman Desa melainkan cenderung didekat kediaman Kepala Desa sehingga terlihat kurang meratanya pembangunan yang terlaksana.
- d. Belum pengawasan Kepala Desa terhadap kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sehingga pembagunan jalan tidak terealisasi sesuai dengan kegiatan anggaran yang ditetapkan.

B. Saran

1. Hendaknya Kepala Desa lebih meningkatkan pengetahuannya didalam penempatan pembangunan Desa Lubuk Keranji Timur Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.
2. Hendaknya Kepala Desa melakukan surve secara rinci terhadap penetapan kegiatan pembangunan.
3. Perlunya Kepala Desa melakukan pengawasan disetiap pembangunan yang sedang berlangsung.
4. Hendaknya Kepala Desa bekerjasama dengan masyarakat terkait upaya-

upaya pembangunan yang akan dilaksanakan.

5. Hendaknya Kepala Desa menerima usulan menerapkan terkait pembangunan didalam meningkatkan aktivitas masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- A.Ubaeidillah dan Abdul Rozak, 2008. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- David Osborne, Peter Plastrik, 2004. *Lima Strategi Menuju Pemerintah Wirausaha*, Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan, Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desntralisasi dan Prtisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Kampung*. Yogyakarta, IRE Press.
- Fakrulloh, Zundan, dkk. 2004. *Kebijakan Desentralisasi Di Persimpangan*. Jakarta. CV.Cipruy. Berkaitan dengan otonomi asli.
- Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Mediatara.
- Huraerah Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasisi Kerakyatan*. Bandung. Humaniora.
- Held, David, 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global*, Terjemahan: Damanhuri, Yogyakarta: Pusta Pelajar.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Juliantara, Wijaya, 2000. *Pembaharuan kabupaten arah realisasi di era otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pembaharuan.

- Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Bandung, Mandar Maju.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- L.P. Sinambela. 2011. *Pelayanan Publik Edisi I*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Musanef. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Mandar.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta, Raneka Jaya.
- _____ 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Nusa Media. Yogyakarta.
- Rasyid, M. Ryass. 2000. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Rozali Abdullah. 2007. *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Situmorang, Victor M. 2000. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- Siswanto. 2011. *Pengantar manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sharma, P. 2004. *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta : Yayasan Menara.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press, Malang.
- Sondang, P Siagian. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Refika Aditama.
- Syaiful, Arief. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*, Averroes Cipta, Malang.
- Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta:Lukman Offset.
- Tarigan, Robinson. 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilaya*. Jakarta : Pustaka LP3S.
- Thoha, Miftah, 2007, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Kampung*. Bandung, Fokusmedia.
- Waab S.A, 2004, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wahad, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Wiguna 2010. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta. Rineka Cipta.

B. Jurnal

- Syafhendri. 2008. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262.

C. Perundang-undang

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan Desa.

Peraturan Dalam Negeri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

